

## **Model PBL (*Problem Based Learning*) Bahan Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN) Dalam Meningkatkan Anti Korupsi Di Kampus**

### **(*PBL Model (Problem Based Learning) Teaching Materials for Pancasila and Citizenship Education (PPKN) in Improving Anti-Corruption on Campus*)**

**Andi Indrawan**

**<sup>1)</sup>Program Studi S1 Agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming**

**Koresponden Author, email: andi.indrawan88@gmail.com>**

#### **ABTRAK**

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kampus dan juga ada di berbagai perguruan tinggi lainnya yang sifatnya hanya materi ingatan saja, sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kebutuhan bahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan memasukan materi anti korupsi. 2) mengembangkan bahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dan 3) untuk mengetahui kelayakan pengembangan bahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). *Problem Based Learning (PBL)* adalah suatu pendekatan pengajaran yang cocok untuk digunakan pada masalah dunia nyata sebagai konteks bagi mahasiswa dalam belajar berpikir kritis dan keterampilan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Sebagai responden adalah mahasiswa yang mengambil matakuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan sks 3(3-0). Responden diambil secara sensus atau semua sehingga berjumlah 17 responden/mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan analisis dokumentasi pada saat perkuliahan berlangsung. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bawa skor aspek Kelayakan isi = 90,59 %, skor aspek, skor aspek Kelayakan Penyajian = 90,00 %, dan skor aspek Kebahasaan dengan angka = 91,67 %. Kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian ini menyatakan bahwa hasil analisis kelayakan modul pembelajaran anti korupsi layak dapat digunakan.

**Kata Kunci: Model PBL, Bahan Ajar, Anti Korupsi.**

#### **ABSTRACT**

*The background to this research is that there are Pancasila and Citizenship Education courses on campus and also in various other universities which are only memory material, so this research aims to: 1) analyze the need for Pancasila and Citizenship Education (PPKN) learning materials by including anti-corruption material. 2) to develop learning materials for Pancasila and Citizenship Education (PPKN) and 3) to determine the feasibility of developing learning materials for Pancasila and Citizenship Education (PPKN). Problem Based Learning (PBL) is a teaching approach that is suitable for use in real world problems as a context for students to learn critical thinking and problem skills, as well as to gain essential knowledge and concepts from the subject matter. The respondents were students who took the Pancasila and Citizenship Education course with 3(3-0) credits. Respondents were taken by census or all, totaling 17 respondents/students. Data collection techniques in this research used interviews and documentation analysis during lectures. Meanwhile, data analysis uses data reduction, data display, and data verification. The results of the research show that the content feasibility aspect score = 90.59%, the aspect score, the presentation feasibility aspect score = 90.00%, and the linguistic aspect score with numbers = 91.67%. The overall conclusion of this research states that the results of the feasibility analysis of the anti-corruption learning module are suitable for use.*

**Keywords: PBL Model, Teaching Materials, Anti-Corruption.**

## PENDAHULUAN

### A. Korupsi dan Anti-Korupsi

Dalam dunia pendidikan terutama pendidikan yang ada di perguruan tinggi, munculnya suatu mata kuliah baru memerlukan penempatan penamaan yang tepat. Demikian pula penamaan untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi. Berdasarkan pengalaman yang ada di beberapa perguruan tinggi yang sudah menyelenggarakan matakuliah anti korupsi ini, selalu ada banyak kendala, banyak pertanyaan, hingga terjadi suatu diskusi dan perdebatan mengenai pentingnya keilmuan manakah untuk mata kuliah Anti-korupsi. Perdebatan biasanya berlangsung di antara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, oleh karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing. (Kemendikbud, 2013).

Pendidikan anti korupsi didasarkan atas adanya fenomena yang semakin parah yang terjadi di Negara kita, yaitu adanya disintegrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diindikasikan terjadinya tindak korupsi yang berkelanjutan tidak ada hentinya sehingga harus diupayakan secara sistematis dan berkelanjutan dalam hal membasminya.

Menurut Kemendikbud (2013), dampak korupsi yang telah terbukti melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggerogoti potensi negara-bangsa dan bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus didiseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan, sehingga diharapkan akan menumbuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi dimasa mendatang.

Menurut Wijayanto (2010), selama ini gerakan melawan korupsi paling banyak dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk yaitu pendekatan Pendekatan

Pengacara (*Lawyer approach*), Pendekatan Bisnis (*Business approach*), Pendekatan Pasar atau Ekonomi (*Market or Economist approach*), Pendekatan Budaya (*Cultural approach*).

Keempat pendekatan diatas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Tetapi di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Lebih memprihatinkan adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil.

Disinilah perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya (*cultural approach*) mulai menguat. Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan masal yang akan mampu melahirkan

bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi. (Kemendikbud, 2013)

Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran terhadap segala potensi tindak korupsi yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Hal inilah yang penting pendidikan anti korupsi diajarkan disemua level pendidikan dari pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

Pendidikan Antikorupsi selain bisa berdiri sendiri sebagai mata kuliah, Pendidikan Antikorupsi juga dapat diintegrasikan dalam berbagai mata kuliah yang sudah ada sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan perilaku mahasiswa. Untuk maksud tersebut dukungan kultur dan iklim perguruan tinggi sangat dibutuhkan terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter mahasiswa.

## **B. Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)**

Salah satu mata kuliah yang mungkin dapat digabung dengan Pendidikan Antikorupsi adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Mata kuliah PPKN menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi.

Farming yang sering disebut dengan aneka usahatani terpadu merupakan salah satu disiplin ilmu yang bertujuan untuk menemukan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi dari masyarakat, mengembangkan keterampilan proses

untuk memahami alam sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan (Tanjung et al., 2020).

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di kampus kami digabungkan dengan Pendidikan Pancasila, sehingga nama mata kuliah tersebut menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sering disingkat dengan PPKN. Mata kuliah (PPKN) dirasa tepat untuk matakuliah yang di dalamnya diintegrasikan materi-materi ajar seputar pendidikan anti korupsi, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib disemua perguruan tinggi di Indonesia, mata kuliah ini tidak hanya serta merta diajarkan di Fakultas Hukum saja, melainkan wajib bagi semua fakultas untuk mengajarkan mata kuliah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN). Sehingga mata kuliah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN) merupakan matakuliah strategis dalam hal melakukan dan menciptakan dan mengkader mahasiswa anti korupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.

Pembelajaran dengan menggunakan model *Problem Based Learning* (PBL), di kampus ini untuk meningkatkan aktifitas para mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) yang selalu berdampingan dengan kehidupan sehari-hari para mahasiswa yang terutama untuk dapat menyelami masyarakat petani, bahwa tugas seorang pengajar adalah menyampaikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswanya. Tujuan yang diharapkan adalah pengetahuan para mahasiswa bertambah dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model pembelajaran

yang tepat agar proses transfer ilmu pengetahuan dari pengajar ke mahasiswa berlangsung secara efektif. *Problem Based Learning* merupakan salah satu dari sekian banyak model pembelajaran yang dapat dilakukan untuk siswa di kampus-kampus baik negeri maupun swasta (Kusmiati et al., 2019)

*Problem Based Learning* (PBL) adalah suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi mahasiswa untuk belajar berpikir kritis dan keterampilan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Hal ini disampaikan juga oleh Trisnawati & Sundari, (2020) menyatakan bahwa model pembelajaran berdasarkan problematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri, dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri.

*Problem Based Learning* (PBL) merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme, yang berorientasi pada proses belajar mahasiswa (*student-centered learning*). *Problem Based Learning* (PBL) berfokus pada penyajian suatu permasalahan (nyata atau simulasi) kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa diminta mencari pemecahannya melalui serangkaian penelitian dan investigasi berdasarkan teori, konsep prinsip yang dipelajarinya dari berbagai ilmu. Permasalahan sebagai fokus, stimulus dan pemandu proses belajar. Sementara pengajar menjadi fasilitator dan pembimbing (Mayasari et al., 2022)

Menurut Kusmiati et al., (2019) menjelaskan karakteristik PBL, yaitu: (1) *learning is student-centered* artinya proses pembelajaran PBL lebih

menitikberatkan kepada mahasiswa sebagai insan belajar; (2) *authentic problems form the organizing focus for learning* artinya masalah yang disajikan kepada mahasiswa adalah masalah yang otentik; (3) *new information is acquired through selfdirected learning* artinya siswa berusaha untuk mencari informasi melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya; (4) *learning occurs in small groups* artinya dilaksanakan dalam kelompok kecil; (5) *teacher act as facilitators* artinya guru hanya berperan sebagai fasilitator.

Dalam UU No 20 Tahun 2003 mengatur bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu program pendidikan atau materi yang wajib dimuat dalam kurikulum di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Tidak terkecuali di Perguruan Tinggi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan wajib ada dan diajarkan di setiap Universitas, Sekolah Tinggi, Fakultas maupun Program Studi di Indonesia. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan pada tahun pertama perkuliahan, hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan awal dan menanamkan sikap anti korupsi pada mahasiswa sejak dini.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan

generasi muda. Disamping itu mahasiswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta para mahasiswa.

### C. Tujuan Penelitian Bahan Pembelajaran Anti-Korupsi

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis kebutuhan bahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan memasukan materi anti korupsi. 2) mengembangkan bahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dan 3) untuk mengetahui kelayakan pengembangan bahan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa tujuan mata kuliah PPKN yang didalamnya ada materi Anti-korupsi ini adalah untuk:

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk korupsi dan aspek-aspeknya
2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.

Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Hal ini senada dengan Statuta (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang yang menyatakan bahwa dalam hal menyelenggarakan pendidikan tinggi

dengan mewujudkan dan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu aspek afektif, aspek kognitif dan aspek psikomotorik para mahasiswa STIP Farming Semarang.

### BAHAN DAN METODE

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian desain atau model desain merupakan suatu studi penelitian yang meliputi proses perancangan yang sistematis. Dalam penelitian ini peneliti mencoba merancang (mendesain) bahan ajar mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) di di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang pada mahasiswa semester pertama kelas A, dan Kelas B pada semester gasal tahun akademik 2022-2023.

Sebagai responden adalah mahasiswa yang mengambil matakuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan sks 3(3-0). Responden diambil secara sensus atau semua sehingga berjumlah 17 responden/mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan analisis dokumentasi pada saat perkuliahan berlangsung. Sedangkan untuk analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi data.

Menurut Mochammad Ronaldy Aji Saputra, (2021), analisis pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menentukan nilai skor dalam bentuk persentase (%) berdasarkan rumus berikut ini:

Kelayakan setiap komponen =

$$= \frac{\text{Skor Hitung}}{\text{Skor Kriteria}} \times 100\%$$

Rumus diatas digunakan untuk mengukur kelayakan setiap komponen dari bahan ajar. Dari hasil keseluruhan komponen tersebut maka dihitung



jumlah rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Hasil Keseluruhan Jumlah}}{\text{Jumlah Komponen}} \times 100\%$$

Setelah diketahui hasil rata-ratanya maka data tersebut diinterpretasikan kembali dengan menggunakan Tabel 1. berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Kelayakan Kualifikasi dan Keputusan

No	Nilai Kelayakan (%)	Kualifikasi	Keputusan
1	< 46,70	Kurang Layak	Banyak Revisi
2	46,80 – 75,00	Layak	Sedikit Revisi
3	> 75,00	Sangat Layak	Tidak direvisi

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi pembelajaran (bahan ajar) dalam kurikulum perlu disusun dan dikembangkan dengan tepat agar seoptimal mungkin membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran atau

perkuliahan PPKN berbasis Anti Korupsi hendaknya memuat lima jenis materi diantara : Materi Fakta, Materi Konsep, Materi Prinsip, Materi Prosedur dan Materi Sikap. Untuk lebih jelasnya akan terperinci dalam Tabel 2. berikut: (Komalasari, 2013)

Tabel 2. Model Materi Ajar PPKN Berbasis Anti Korupsi

Jenis Materi Perkuliahan	Tuntutan Perkuliahan
Fakta	Mencari dan menyebutkan kasus-kasus tentang korupsi yang pernah terjadi/dilakukan oleh pejabat-pejabat negara.
Konsep	Dapat mendefinisikan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi mengenai tindakan korupsi
Prinsip	Memahami dan menganalisis kasus-kasus korupsi dimulai dari hal yang melatar belakangi sampai pada putusan pengadilan.
Prosedur	Pembuatan skema alur diagram alir pola berfikir hasil dari analisis/pengamatan mengenai satu kasus korupsi sampai menghasilkan sebuah solusi untuk pencegahan dan penanggulangan.
Sikap atau Nilai	Terampil, berpengalaman dan berkarakter

Sumber : (Komalasari, 2013)

Dari Tabel 2. di atas dapat dijelaskan bahwa materi ajar untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimulai dengan materi Fakta, dimana mahasiswa diminta untuk mencari dan menyebutkan kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi selama ini (minimal 5 tahun terakhir), setelah mahasiswa mendapatkan kasus-kasus tindak korupsi kemudian dosen terlebih dahulu menjelaskan mengenai pengertian Korupsi, Jenis-Jenis Korupsi, Klasifikasi tindak korupsi dan lain sebagainya yang mana semua merupakan materi Konsep.

Kemudian setelah mahasiswa mengerti mengenai materi konsep, dosen menyuruh mahasiswa untuk mengamati dan menganalisis kasus-kasus yang sudah disebutkan oleh mahasiswa di awal, mahasiswa disuruh mencari data-data mengenai kasus tersebut dari awal kasus sampai dengan putusan pengadilan (putusan pengadilan tetap), mahasiswa dibebaskan untuk mencari data-data tersebut dari berbagai sumber di internet, literature maupun narasumber yang relevan dengan kasus tindak korupsi itu merupakan bagian dari materi prinsip.

Kemudian setelah data-data terkumpul mahasiswa menuliskan hasil analisisnya dan pengamatanya yang diperoleh dari berbagai sumber mahasiswa disuruh untuk membuat diagram alir pola berfikir dari hasil pengamatanya dan analisisnya sehingga menghasilkan sebuah penyelesaian dan pencegahan untuk tindak pidana korupsi.

Berikutnya dari hasil analisis dan hasil rekomendasi berupa penyelesaian pencegahan akan ditampilkan dan presentasikan di depan kelas secara bergantian. Dengan materi ajar seperti itu maka harapanya akan terbentuk mahasiswa anti korupsi yang terampil menangani dalam memberantas korupsi,

berpengalaman dalam mencegah dan mengatas korupsi serta berkarakter antipati terhadap korupsi.

Kemudian jika digambarkan dalam bentuk diagram alir (gambar) maka akan terlihat bahwa model materi ajar seperti itu akan membuat mahasiswa memperoleh pengetahuan tentang tindak korupsi, keterampilan menganalisis kasus-kasus tindak korupsi seperti analisis putusan, kampanye, atau penyampaian di depan publik bermanfaat memberikan experiential learning. Dengan tujuan utama untuk membentuk sikap dan mengkaderisasi mahasiswa antikorupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.



Gambar 1. Model Materi Ajar PPKN Berbasis Anti Korupsi

Daftar pertanyaan yang diedarkan kepada mahasiswa yang terkait dengan model bahan ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), yang

didalamnya mencakup materi anti korupsi, diberikn kepada mahasiswa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Peserta Kelas PPKN Kelas A dan B

No	Semester	Kode MK	SKS	Kelas	Jumlah
1	I	S1101	3(3-0)	A	7
2	I	S1101	3(3-0)	B	10
Jumlah Mahasiswa					17

Sumber: Data Primer Diolah Th. 2022.

Hasil analisis angket yang diberikan kepada mahasiswa terkait dengan keinginan untuk pembuatan modul pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) menunjukkan 17 mahasiswa (100%) mahasiswa setuju. Alasan yang disampaikan oleh mahasiswa adalah untuk lebih memudahkan dalam memahami pembelajaran anti korupsi.

Hal-hal yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi atau sangat rumit akan lebih mudah dapat dijelaskan dengan model yang sederhana dengan modul berikut, sesuai dengan tingkat berfikir mahasiswa, sehingga lebih cepat dan mudah dipahami. Selain hal tersebut yang menjadi fokus utama adalah agar hasil outputnya mudah dicapai. Pembuatan atau perencanaan model bahan ajar dalam hal ini adalah modul pembelajaran anti korupsi yang harapannya dapat menambah menambah pengetahuan dan referensi di perpustakaan STIP Farming Semarang dan dapat dipakai sebagai sumber belajar dan acuan bagi mahasiswa untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).

Pengembangan modul bahan ajar anti korupsi yang sifatnya mandiri atau menjadi matakuliah yang berdiri sendiri biasanya akan mempermudah para

mahasiswa dalam mempelajari kasus-kasus anti korupsi secara kekinian. Hasil analisis terhadap angket yang diberikan kepada mahasiswa menunjukkan 7 mahasiswa (41,2%) setuju dengan pengembangan modul yang bersifat mandiri sisanya 10 mahasiswa menjadi satu dengan PPKN. Bahan ajar anti korupsi yang sifatnya mandiri memberikan lebih dampak yang lebih fokus pada paraktek-praktek korupsi.

Namun disisi lain jika mandiri akan menambah jumlah sks untuk jenjang strata satu Agribisnis (S-1), hal ini tidak memungkinkan karena kurikulum yang dimiliki oleh STIP Farming sudah cukup berat yaitu sebanyak 150 sks. Hal ini karena dalam proses pengembangan modul harus melewati telaah kurikulum, sehingga memiliki relevansi dengan kurikulum.

Menurut Purwanto et al., (2021), kelayakan penilaian materi modul pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu aspek kelayakan isi dan aspek kelayakan penyajian. Aspek-aspek tersebut dijabarkan menjadi beberapa indikator penilaian. Aspek kelayakan isi terdiri dari beberapa indikator yaitu kelayakan isi ada 17 aspek sedangkan kelayakan penyajian ada 8 aspek seperti Table 4. Berikut ini.



Tabel 4. Indikator Aspek Kelayakan Isi dan Aspek Kelayakan Penyajian

No	Aspek Kelayakan Isi	No	Aspek Kelayakan Penyajian
1	Kelengkapan Materi	1	Konsistensi Sistematika Sajian Dalam Bab
2	Keluasan Materi	2	Kelogisan Penyajian
3	Kadalaman Materi	3	Keruntutan Konsep
4	Keakuratan Konsep Dan Definisi	4	Pengantar/Pendahuluan
5	Keakuratan Prinsip	5	Daftar Pustaka
6	Keakuratan Contoh Data Dan Fakta	6	Ketepatan Ukuran Dan Warna Media Dengan Materi
7	Keakuratan Gambar, Diagram Dan Ilustrasi	7	Keseimbangan Antar Bab
8	Keakuratan Acuan Pustaka	8	Keterpaduan Materi Dengan Contoh Gambar
9	Kesesuaian Materi Dengan Perkembangan Ilmu		
10	Gambar, Diagram Dan Ilustrasi Aktual		
11	Kelayakan Penyajian Menggunakan Contoh		
12	Pemutakhiran Pustaka		
13	Penalaran		
14	Keterkaitan Antar Konsep		
15	Komunikasi		
16	Kemenarikan Materi		
17	Mendorong Untuk Kemandirian Belajar		

Sumber: Purwanto et al., (2021)

Adapun hasil penilaian dari Aspek Kelayakan Isi ada 17 aspek dapat dilihat

pada Tabel 5. berikut ini:

Tabel 5. Skor Aspek Kelayakan Isi

No	Indikator Aspek Kelayakan Isi	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Kelengkapan Materi				✓	
2	Keluasan Materi				✓	
3	Kadalaman Materi					✓
4	Keakuratan Konsep Dan Definisi					✓
5	Keakuratan Prinsip					✓
6	Keakuratan Contoh Data Dan Fakta				✓	
7	Keakuratan Gambar, Diagram Dan Ilustrasi				✓	
8	Keakuratan Acuan Pustaka					✓
9	Kesesuaian Materi Dengan Perkembangan Ilmu				✓	
10	Gambar, Diagram Dan Ilustrasi Aktual				✓	
11	Kelayakan Penyajian Menggunakan Contoh					✓
12	Pemutakhiran Pustaka					✓
13	Penalaran					✓
14	Keterkaitan Antar Konsep				✓	
15	Komunikasi					✓
16	Kemenarikan Materi					✓
17	Mendorong Untuk Kemandirian Belajar				✓	
					8	9

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Keterangan skor: 1). Tidak layak, 2). Kurang layak, 3). Cukup Layak, 4). Layak, 5). Sangat layak

Berdasarkan teknik analisis data yang digunakan dan dari penilaian ahli materi/isi dan penyajian serta ahli bahasa dalam hal ini dilakukan oleh Ketua Program Studi Agribisnis S1 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang, ditentukan tingkat kehandalam modul pembelajaran PPKN. Kelayakan penilaian materi modul pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu aspek kelayakan isi dan aspek kelayakan penyajian.

Menurut Tabel 5, diatas Indikator Aspek Kelayakan Isi terdiri dari 17 aspek indikator yaitu: Kelengkapan Materi, Keluasan Materi, Kadalaman Materi, Keakuratan Konsep dan Definisi, Keakuratan Prinsip, Keakuratan Contoh Data dan Fakta, Keakuratan Gambar, Diagram dan Ilustrasi, Keakuratan Acuan Pustaka, Kesesuaian Materi Dengan Perkembangan Ilmu, Gambar, Diagram dan Ilustrasi Aktual, Kelayakan Penyajian Menggunakan Contoh, Pemutakhiran Pustaka, Penalaran, Keterkaitan Antar Konsep, Komunikasi, Kemenarikan Materi, Mendorong Untuk Kemandirian Belajar.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui aspek kelayakan isi mendapatkan skor sbb:

Skor Layak (bobot 4) = 8  
 Skor Sangat Layak (bobot 5) = 9

Skor Hitung = 77  
 Skor Kriterion = 85  
 Skor aspek Kelayakan isi = 90,59 %

Hal ini menunjukkan bahwa modul ini dapat dijadikan sebagai modul pembelajaran anti korupsi. Ada beberapa indikator mendapat nilai kurang atau tidak mencapai nilai maksimal, yaitu pada indikator: kelengkapan materi, keluasan materi, keakuratan contoh data dan fakta, keakuratan gambar, diagram dan ilustrasi, kesesuaian materi dengan perkembangan ilmu, gambar, diagram dan ilustrasi aktual, keterkaitan antar konsep, mendorong untuk kemandirian belajar.

Namun demikian kekurangan pada beberapa indikator tersebut tertutup oleh beberapa indikator lain yang mempunyai nilai maksimal, yaitu indikator aspek: kadalaman materi, keakuratan konsep dan definisi, keakuratan prinsip, keakuratan acuan pustaka, kelayakan penyajian menggunakan contoh, pemutakhiran pustaka, penalaran, komunikasi, kemenarikan materi, sehingga modul tetap mempunyai nilai yang masuk dalam klasifikasi layak sebagai modul pembelajaran.

Adapun hasil penilaian dari Aspek Kelayakan Penyajian ada 8 aspek dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini:

Tabel 6. Skor Aspek Kelayakan Penyajian

No	Indikator Aspek Kelayakan Penyajian	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Konsistensi Sistematika Sajian Dalam Bab				√	
2	Kelogisan Penyajian					√
3	Keruntutan Konsep					√
4	Pengantar/Pendahuluan					√
5	Daftar Pustaka					√
6	Ketepatan Ukuran Dan Warna Media Dengan Materi				√	
7	Keseimbangan Antar Bab				√	
8	Keterpaduan Materi Dengan Contoh Gambar				√	
					4	4

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Keterangan skor: 1). Tidak layak, 2). Kurang layak, 3). Cukup Layak, 4). Layak, 5). Sangat layak

Berdasarkan Tabel 6. aspek Kelayakan Penyajian ada 8 indikator yaitu konsistensi sistematika sajian dalam bab, kelogisan penyajian, keruntutan konsep, pengantar/ pendahuluan, daftar pustaka, ketepatan ukuran dan warna media dengan materi, keseimbangan antar bab, keterpaduan materi dengan contoh gambar.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui aspek kelayakan isi mendapatkan skor sbb:

Skor Layak (bobot 4)	= 4
Skor Sangat Layak (bobot 5)	= 4
Skor Hitung	= 36
Skor Kriterion	= 40

Jadi dengan menggunakan rumus diatas diperoleh Skor aspek Kelayakan

Penyajian = 90,00 % yang artinya modul ini dari aspek penyajian materi juga layak dijadikan sebagai modul pembelajaran.

Ada empat indikator mendapat nilai kurang atau tidak mencapai nilai maksimal yaitu: konsistensi sistematika sajian dalam bab, ketepatan ukuran dan warna media dengan materi, keseimbangan antar bab, keterpaduan materi dengan contoh gambar.

Akan tetapi ada empat indikator kelayakan penyajian yang mendapatkan nilai maksimal, yaitu indikator: kelogisan penyajian, keruntutan konsep, pengantar/pendahuluan, daftar pustaka, karena indikator ini sesuai dengan kondisi kampus saat itu sehingga mudah dalam hal penyajiannya.

Tabel 7. Skor Aspek Kebahasaan (aspek bahasa)

No	Indikator Aspek Kebahasaan	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Ketepatan struktur kalimat				√	
2	Keefektifan kalimat					√
3	Kebakuan istilah					√
4	Pemahaman terhadap pesan atau informasi					√
5	Ketepatan penggunaan istilah					√
6	Konsistensi penggunaan simbol/ lambang				√	
7	Ketertautan antar paragraf				√	
8	Keutuhan makna dalam paragraf				√	
9	Kutuhan hubungan antar paragraf					√
10	Keutuhan hubungan antara bab					√
11	Kemampuan mendorong berfikir kritis					√
12	Kesesuaian bahasa dengan tingkat intelektual peserta didik					√
					4	8

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Keterangan skor: 1). Tidak layak, 2). Kurang layak, 3). Cukup Layak, 4). Layak, 5). Sangat layak

Berdasarkan Tabel 7. dari aspek kebahasaan beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Skor 4 (layak) yaitu indikator: ketepatan struktur kalimat, konsistensi penggunaan simbol/ lambing, ketertautan antar paragraph, keutuhan makna dalam paragraph.

b) Skor 5 (sangat layak) yaitu indikator: keefektifan kalimat, kebakuan istilah, pemahaman terhadap pesan atau informasi, ketepatan penggunaan istilah, kutuhan hubungan antar paragraph, keutuhan hubungan antara bab, kemampuan mendorong berfikir kritis,

kesesuaian bahasa dengan tingkat intelektual peserta didik.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui aspek kebahasaan (bahasa) mendapatkan skor sbb:

Skor Layak (bobot 4)	= 4
Skor Sangat Layak (bobot 5)	= 8
Skor Hitung	= 55
Skor Kriteria	= 60

Sehingga Kelayakan setiap komponen =  $(\text{Skor Hitung})/(\text{Skor Kriteria}) \times 100\%$ , akan diperoleh skor aspek kebahasaan dengan angka = 91,67 % yang artinya bahwa rencana materi modul ini sebagai pembelajaran layak untuk dijadikan sebagai modul pembelajaran.

Ada kekurangan dan kelebihan indikator aspek yang ternyata dapat menutupi kekurangan aspek yang lain sehingga hasil akhir dapat dikatakan

bahwa rencana modul tersebut berdasarkan aspek kebahasaan layak digunakan.

Perlu adanya perhatian secara khusus untuk indikator terkait yang mempunyai nilai kurang, untuk dapat diperbaiki atau disempurnakan pada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan di masa yang akan datang. Jika ternyata hasil validasi yang diperoleh mencerminkan hasil yang kurang baik, untuk beberapa indikator tertentu, maka tidak menutup kemungkinan untuk dapat diperbaiki atau direvisi demi dibuat lebih baik.

Berdasarkan pembahasan diatas, secara keseluruhan, hasil analisis kelayakan modul pembelajaran anti korupsi layak dapat digunakan yang hasilnya dapat dilihat pada grafik diagram batang sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Hasil Kelayakan Modul Pembelajaran PPKN Anti Korupsi (Sumber: Data Primer 2022)

## PENUTUP

### Kesimpulan dan Rekomendasi

1. *Problem Based Learning* (PBL) merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme (peningkatkan perkembangan logika) yang berorientasi pada proses belajar mahasiswa sehingga PBL berfokus

pada penyajian suatu permasalahan baik nyata maupun dengan simulasi kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa diminta mencari pemecahannya.

2. Bahan ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan memasukkan basis Anti Korupsi perlu diterapkan di kampus STIP Farming pada khususnya dan

pada perguruan tinggi lainnya pada umumnya.

3. Skor aspek Kelayakan isi = 90,59 % (sangat layak), skor aspek, skor aspek Kelayakan Penyajian = 90,00 % (sangat layak), dan skor aspek kebahasaan dengan angka = 91,67 % (sangat layak). Kesimpulan dari penelitian ini adalah, secara keseluruhan, hasil analisis kelayakan modul pembelajaran anti korupsi layak dapat digunakan

Dengan demikian, hasil penelitian modul pembelajaran dengan memasukkan bahan ajar anti korupsi di PPKN dalam penelitian ini layak dikembangkan dan digunakan atau diterapkan di Program Studi S-1 Agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud, R. I. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Kemendikbud. <http://repository.stikesrspadgs.ac.id/31/1/Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi-167hlm.pdf>
- Komalasari, K. (2013). Pembelajaran Konstektual Konsep & Aplikasi. Refika Aditama. Bandung.
- Kusmiati, E., Kusnadi, D., & Latipah, L. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Ipa Dalam Memahami Konsep Hubungan Antara Struktur Organ Tubuh Manusia Dengan Fungsi Dan Pemeliharaannya. *Jurnal Tahsinia*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.57171/jt.v1i1.36>
- Mayasari, A., Arifudin, O., & Juliawati, E. (2022). Implementasi Model Problem Based Learning (Pbl) Dalam Meningkatkan Keaktifan Pembelajaran. *Jurnal Tahsinia*, 3(2), 167–175. <https://doi.org/10.57171/jt.v3i2.335>
- Mochammad Ronaldy Aji Saputra. (2021). Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Berbasis Web. Yayasan Lembaga Gumun Indonesia (YLG I). [https://books.google.co.id/books?id=uYxFEAAQBAJ&pg=PA38&dq=menghitung++skor+kelayakan&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjyqs270f-AxVUxjgGHZJsBNo4ChDoAXoE C A c Q A g # v =onepage&q=menghitung skor kelayakan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=uYxFEAAQBAJ&pg=PA38&dq=menghitung++skor+kelayakan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjyqs270f-AxVUxjgGHZJsBNo4ChDoAXoE C A c Q A g # v =onepage&q=menghitung skor kelayakan&f=false)
- Purwanto, A., Paiman, P., & Sudiro, A. (2021). Pengembangan Bahan Ajar Sistem Informasi Geografis Berbasis Higher Order Tinking Skill (HOTS). *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 43–52.
- Tanjung, R., Supandi, S., & Abdillah, A. (2020). Model Cooperative Learning Tipe Stad Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA Sub Pokok Bahasan Jenis-Jenis Tanah. *Jurnal Tahsinia*, 1(2), 169–180.
- Kemendikbud, R. I. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Kemendikbud. <http://repository.stikesrspadgs.ac.id/31/1/Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi-167hlm.pdf>



- Komalasari, K. (2013). *Pembelajaran Kontektual Konsep & Aplikasi*. RefikaAditama. Bandung.
- Kusmiati, E., Kusnadi, D., & Latipah, L. (2019). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Ipa Dalam Memahami Konsep Hubungan Antara Struktur Organ Tubuh Manusia Dengan Fungsi Dan Pemeliharaannya. *Jurnal Tahsinia*, 1(1), 49–62. <https://doi.org/10.57171/jt.v1i1.36>
- Mayasari, A., Arifudin, O., & Juliawati, E. (2022). Implementasi Model Problem Based Learning (Pbl) Dalam Meningkatkan Keaktifan Pembelajaran. *Jurnal Tahsinia*, 3(2), 167–175. <https://doi.org/10.57171/jt.v3i2.335>
- Mochammad Ronaldy Aji Saputra. (2021). *Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Berbasis Web*. Yayasan Lembaga Gumun Indonesia (YLGI). [https://books.google.co.id/books?id=uYxFEAAAQBAJ&pg=PA38&dq=menghitung++skor+kelayakan&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjyqs270f,AAxVUxjgGHZJsBNo4ChDoAXoECAcQAq#v=onepage&q=menghitung skor kelayakan&f=false](https://books.google.co.id/books?id=uYxFEAAAQBAJ&pg=PA38&dq=menghitung++skor+kelayakan&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjyqs270f,AAxVUxjgGHZJsBNo4ChDoAXoECAcQAq#v=onepage&q=menghitung%20skor%20kelayakan&f=false)
- Purwanto, A., Paiman, P., & Sudiro, A. (2021). Pengembangan Bahan Ajar Sistem Informasi Geografis Berbasis Higher Order Tinking Skill (HOTS). *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 43–52.
- Tanjung, R., Supandi, S., & Abdillah, A. (2020). Model Cooperative Learning Tipe Stad Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPA Sub Pokok Bahasan Jenis-Jenis Tanah. *Jurnal Tahsinia*, 1(2), 169–180.